

ABSTRAK

Tindak pidana pemerasan merupakan kejahatan yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai bentuk dan modus. Salah satu contohnya adalah individu yang melakukan pemungutan uang parkir secara ilegal di tempat umum tanpa izin resmi, di mana mereka kerap menggunakan ancaman atau tekanan agar masyarakat mau membayar. Praktik pemerasan juga terjadi dengan modus permintaan THR secara paksa oleh kelompok atau organisasi tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi serta menganalisis kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menindak pelaku pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dimulai dari laporan atau pengaduan masyarakat. Proses penanganan dilaksanakan secara sistematis mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 368 KUHP. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam menjerat pelaku pemerasan. Dalam menindak pelaku tindak pidana pemerasan, aparat kepolisian di wilayah hukum Polresta Jambi dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa takut, pemerasan juga jarang terjadi secara terbuka, sehingga sulit dideteksi tanpa adanya laporan masyarakat. Sebagai bentuk upaya pencegahan, pihak kepolisian memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk lebih sadar hukum dan aktif menjaga diri dari tindakan yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemerasan, Polresta Jambi

ABSTRACT

Extortion is a crime that is often encountered in everyday life with various forms and modes. One example is individuals who collect parking fees illegally in public places without official permission, where they often use threats or pressure to get people to pay. The practice of extortion also occurs with the mode of forced THR requests by certain groups or organizations. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of law enforcement by the police against perpetrators of extortion in the jurisdiction of the Jambi Police and to analyze the obstacles faced by police officers in prosecuting extortion in the jurisdiction of the Jambi Police, and how to overcome them. The method used in this study is an empirical juridical research method. Data collection in this study was carried out through interviews. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of law enforcement by the police against perpetrators of extortion in the jurisdiction of the Jambi Police is carried out based on applicable legal procedures, starting from public reports or complaints. The handling process is carried out systematically starting from investigation, inquiry, to the transfer of cases to the prosecutor's office, guided by the provisions of Article 368 of the Criminal Code. This article serves as the legal basis for police in prosecuting extortion perpetrators. In prosecuting extortion perpetrators, police officers within the Jambi Police jurisdiction face several obstacles, including victims' lack of courage to report due to fear. Extortion rarely occurs openly, making it difficult to detect without public reports. As a preventative measure, the police recommend that the public be more aware of the law and actively protect themselves from unlawful acts..

Keywords: *Law Enforcement, Extortion, Jambi Police*